



PUTUSAN

NOMOR 253/G/2022/PTUN.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa sebagai berikut dalam perkara:

JUMHANI RS, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Patikal Lama Rt. 000, Rw. 000 Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat, Pekerjaan Kadus II Desa Patikal Lama.

Dalam hal ini diwakili oleh :

1. Drs. Wimpi, S.H., M.M;
2. Roby Septiyan, S.H;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat /Pengacara pada Kantor Hukum Drs. Wimpi, S.H., M.M dan Rekan, alamat di Jalan Veteran Lrg. RRI Pertama (Komp. Polri) No. 429 Rt. 09 Kel 9 ilir Kec. IT III Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, domisili elektronik drs.wimpi@gmail.com, Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 03/SKK-PTUN.Plg/VII/2022 tanggal 21 Juli 2022,

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Lawan

KEPALA DESA PATIKAL LAMA, tempat kedudukan di Desa Patikal Lama Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. Noak Banjarnahor, S.H.;

Halaman 1 Putusan Perkara Nomor 253/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M.;
3. Riza Faisal Ismed, SH;
4. Muhammad Padli, S.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) berdomisili hukum di Partai Nasdem Tower LANTAI 9 yang beralamat di lantai RP. Suroso No.44-46 Gondangdia Lama Menteng Jakarta Pusat DKI Jakarta. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus 28 September 2022. Domisili elektronik noakpartner@gmail.com.

Selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat.**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 253/PEN-DIS/2022/PTUN.PLG, tanggal 22 September 2022, tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 253/PEN-MH/2022/PTUN.PLG, tanggal 22 September 2022, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitia Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 253/PEN-PPJS/2022/PTUN.PLG tanggal 22 September 2022 tentang Penunjukan Panitia Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 253/PEN-PP/2022/PTUN.PLG, tanggal 22 September 2022, Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 253/PEN-HS/2022/PTUN.PLG, Tanggal 6 Oktober 2022, Tentang Penetapan Hari Sidang dan Tentang Jadwal persidangan Elektronik;
6. Telah mendengar keterangan Para Pihak, Saksi yang diajukan dalam Persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 21 September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 2 Putusan Perkara Nomor 253/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 21 September 2022 dengan Register Perkara Nomor: 253/G/2022/PTUN.PLG, dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 6 Oktober 2022 yang mengemukakan pada pokoknya :

A. Objek Sengketa

Keputusan Kepala Desa Patikal Lama Nomor : 141/12/SK/PTL-KT/2022 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Dan Sekretaris Desa Patikal Lama Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat tertanggal 06 Juli 2022 atas nama JUMHANI.

Adapun uraian mengenai Objek Sengketa merupakan keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap KTUN tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perkara *aquo* karena Surat keputusan/Objek Sengketa merupakan *Beschikking* yang merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang bersifat Kongkrit, Individual, dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata sebagaimana dalam penjelasan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga penerbitan Objek Sengketa adalah didasarkan kepada suatu Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 sebagaimana yang telah diuraikan diatas, menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili dan memutus suatu perkara, agar suatu perkara dapat dikatakan sebagai perkara yang masuk dalam lingkup kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :
 - 2.1 **Penetapan tertulis**, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9, "Penetapan Tertulis" yang dimaksud adalah Objek Sengketa

Halaman 3 Putusan Perkara Nomor 253/G/2022/PTUN.PLG



yang telah dikeluarkan atas Keputusan yang di keluarkan oleh Tergugat.

- 2.2 Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN**, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 ketentuan tersebut, Keputusan *aquo* atas diterbitkan/dikeluarkan Objek Sengketa oleh Badan atau Pejabat Pusat dan Daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif. Dalam perkara *aquo* Tergugat adalah Kepala Desa Patikal Lama yang merupakan Badan atau Pejabat TUN yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat 4 Peraturan Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 ***"Kepala Desa atau sebutan lain adalah Pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah"***
- 2.3 Yang berisi tindakan hukum TUN** berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, Tindakan hukum Tata Usaha Negara yang dimaksud adalah dengan diterbitkan/dikeluarkan Objek Sengketa *aquo* akan menimbulkan akibat hukum berupa hilangnya Penghasilan Tetap yang semestinya diterima oleh Penggugat setiap bulannya sesuai perhitungan yang semestinya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- 2.4 Bersifat Konkrit**, Objek Sengketa yang diterbitkan / di keluarkan oleh Tergugat tidaklah abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan kepada siapa keputusan Tata Usaha Negara ditujukan. Dalam perkara Keputusan Tata Usaha Negara yang dilahirkan oleh Tergugat bersifat Kongkret merupakan Keputusan Objek Sengketa *aquo*.
- 2.5 Bersifat Individual**, Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditunjukkan untuk umum, tetapi tertentu kepada siapa Keputusan



tersebut ditujukan. Objek Sengketa *aquo* ditujukan bagi subyek hukum untuk atas nama Penggugat.

2.6 Bersifat Final, Bahwa Keputusan/Objek Sengketa *aquo* bersifat Final dan Definitive serta sudah tidak lagi membutuhkan persetujuan dari atasan atau instansi lain dan karena menimbulkan akibat hukum atas terbitnya Objek Sengketa, akan berdampak pada hilangnya Penghasilan Tetap yang semestinya diterima oleh Penggugat setiap bulannya sesuai perhitungan yang semestinya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

2.7 Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang dan Badan Hukum Perdata, Keputusan Tata Usaha Negara yang di lahirkan oleh Tergugat menimbulkan akibat hukum oleh karena tindakan hukum yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat TUN melalui Penetapan Tertulis, akibat hukum adalah menimbulkan perubahan dalam situasi keadaan hukum yang ada bagi Penggugat.

A. KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara" dan Pasal 50 berbunyi "Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama" sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* karena Objek Sengketa adalah tindakan Hukum Perdata yang bersifat Tata Usaha Negara.

2. Bahwa dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perkara *aquo* karena berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan

Halaman 5 Putusan Perkara Nomor 253/G/2022/PTUN.PLG



Tata Usaha Negara dalam Pasal 1 angka 10 berbunyi **“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan ataupun pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”**

3. Bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam Pasal 1 angka 8 berbunyi **“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”**. Maka dalam hal ini kedudukan Tergugat adalah sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara karena Tergugat bertindak sebagai Kepala Desa (Kepala Desa Patikal Lama Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan) yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bahwa kemudian berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam Pasal 54 ayat 1 berbunyi **“Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat”** bahwa mengingat Objek Sengketa *aquo* yang berupa Surat Keputusan yang dilahirkan/dikeluarkan oleh Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini bertindak sebagai Kepala Desa (Kepala Desa Patikal Lama Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan), sehingga Domisili Tergugat adalah berkedudukan di Desa Patikal lama Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan dengan **demikian tempat kedudukan Tergugat**



tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.

B. TENGGANG WAKTU

1. Bahwa terhadap tenggang waktu pengajuan gugatan, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi "***bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkan Keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara***".
2. Bahwa atas ketentuan tersebut perlulah dijelaskan terlebih dahulu tentang kronologis Pelantikan Tergugat hingga dikeluarkan / di terbitkannya Objek Sengketa, agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* dapat memahami apakah gugatan telah melampaui batas waktu Pengajuan gugatan atau tidak.
3. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2021, dilaksanakan pelantikan seluruh Kepala Desa di wilayah Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan secara serentak yang dilaksanakan di Kantor Bupati Lahat. Setelah dilantik Tergugat yang telah menduduki jabatan sebagai Kepala Desa (Kepala Desa Patikal Lama Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan) Tergugat tidak lagi mempekerjakan/memfungsikan Penggugat, dan tugas-tugas Penggugat dilaksanakan oleh Tergugat sendiri. Kemudian pada tanggal 6 Juli 2022, Penggugat menerima Keputusan Kepala Desa Patikal lama Nomor : 141/12/SK/PTL-KT/2022 tentang Pemberhentian Penggugat. Kemudian setelah berkordinasi dengan Kuasa Hukum selanjutnya, Penggugat mengirimkan **Surat Keberatan (Upaya Administrasi) pada tanggal 06 September 2022 dengan nomor Surat : 10/WI/IX/2022** dan telah diterima oleh Tergugat, namun setelah melampaui waktu 10 (sepuluh) hari kerja tetap tidak ada tanggapan atau balasan dari Tergugat.
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut, dalam Ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 77 ayat 5 berbunyi "***dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintah tidak***

Halaman 7 Putusan Perkara Nomor 253/G/2022/PTUN.PLG



menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu yang sebagaimana yang dimaksud pada ayat 4, keberatan dikabulkan” sehingga Surat Keputusan/Objek Sengketa *aquo* yang diterbitkan oleh Tergugat adalah tidak sah, untuk mendapatkan keputusan hukum tetap terkait Objek Sengketa *aquo*, Pengugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan pendaftaran gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 2 September 2022 sehingga gugatan Penggugat masih dalam batas waktu Pengajuan gugatan atau belum melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari).

C. KEPENTINGAN YANG DIRUGIKAN

1. KEPENTINGAN PENGGUGAT

Bahwa Kepentingan Penggugat mengajukan gugatan *aquo* adalah karena Penggugat setelah diterbitkannya Objek Sengketa telah diberhentikan dalam jabatannya sebagai Perangkat Desa Patikal Lama Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, yang sebelumnya telah menjabat selama lebih dari 3 (tiga) tahun menjabat sebagai Kadus II Desa Patikal Lama Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat, berdasarkan Keputusan Kepala Desa Patikal Lama Nomor : 141/03/SK/PL-KT/2019 tanggal 08 Januari 2019 terkait hal ini gugatan *aquo* jelas memenuhi kriteria atau ketentuan hukum Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 Ayat (1) yang berbunyi **“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan Tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”** Kerugian mana menurut kepentingan tersebut adalah Penggugat yang telah diberhentikan/dipecat dari kedudukannya sebagai Perangkat Desa Patikal Lama.

2. KERUGIAN PENGGUGAT

Halaman 8 Putusan Perkara Nomor 253/G/2022/PTUN.PLG



Bahwa kemudian oleh karena terbitnya Objek Sengketa yang lahir atas KTUN dari Tergugat, Penggugat telah kehilangan hak-haknya setelah di berhentikan sebagai Perangkat Desa Patikal Lama diantaranya kerugian berupa hilangnya Penghasilan Tetap yang semestinya diterima Penggugat setiap bulannya sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penghasilan yang dimaksud sudah tidak lagi diterima oleh Penggugat sejak bulan Juli 2022.

E. DASAR GUGATAN

1. Bahwa Penggugat telah menjabat sebagai Perangkat Desa (Desa Patikal Lama Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan) yang Pengangkatannya didasarkan Surat Keputusan Nomor: 141/03/SK/PL-KT/2019 tertanggal 08 Januari 2019 dengan lampiran Keputusan Kepala Desa Patikal Lama Nomor : 141/03/SK/PL-KT/2019 tertanggal 08 Januari 2019 oleh Kepala Desa sebelumnya atas nama MARDIYANSYAH yang diangkat sebagai KADUS II Desa Patikal Lama. Bahwa Penggugat telah bekerja selama lebih 3 (tiga) tahun, dan telah mengabdikan dengan baik tidak pernah melakukan pelanggaran dan tidak pernah memiliki masalah, dan bekerja sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, tidak pernah mendapatkan surat teguran dan tidak pula mendapatkan surat pemberhentian sementara, namun setelah dikeluarkannya OBJEK SENKETA, kedudukan Penggugat sudah diberhentikan sebagai Perangkat Desa Patikal Lama, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat.
2. Bahwa Penggugat sebelum diterbitkannya Objek Sengketa, masih mendapatkan Gaji beserta tunjangan-tunjangan setiap bulannya, sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. namun setelah diterbitkan Objek Sengketa, Penggugat sudah tidak mendapatkan Gaji beserta tunjangan-tunjangan tersebut, jelas terhadap hak-hak Penggugat sebagaimana penjelasan dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 6



Tahun 2014 tentang Desa telah diberhentikan, hal ini tentunya telah bertentangan dengan Pasal 53 Ayat 1 dan 2 Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 10 Undang-Undang No.30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

F. ALASAN GUGATAN

1 Keputusan Tata Usaha Negara Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku yaitu:

a. Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa.

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat Objek Sengketa Perihal Pemberhentian Penggugat, adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, yang tercantum pada pasal berikut :

a) Pasal 53 ayat (2)

Pasal tersebut menjelaskan bahwa **“Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf c karena”**

- a) Usia telah genap 60 Tahun;
- b) Berhalangan tetap
- c) Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa.
- d) Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.

Bahwa ketentuan dalam Pasal 53 Ayat (2) tersebut akan dijelaskan dan diuraikan oleh Penggugat berdasarkan Fakta Hukum sebagai berikut:

- 1). Penjelasan ketentuan huruf (a) Pada Pasal 53 ayat (2) bahwa Penggugat pada saat diterbitkannya Objek Sengketa *aquo* belum berumur 60 Tahun, sehingga ketentuan ini tidak dapat dijadikan dasar Tergugat untuk menerbitkan Objek Sengketa *aquo* dan memberhentikan Penggugat.
- 2). Penjelasan ketentuan huruf (b) Pada Pasal 53 ayat (2) bahwa Penggugat dalam keadaan sehat dan dapat bekerja menjalankan tugas sebagai Perangkat Desa Patikal Lama, sehingga ketentuan ini tidak dapat dijadikan dasar Tergugat untuk menerbitkan Objek Sengketa *aquo* dan memberhentikan Penggugat.



- 3). Penjelasan ketentuan huruf (c) Pada Pasal 53 ayat (2) bahwa Penggugat telah memenuhi segala persyaratan dari ketentuan Pasal 50 Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, sehingga ketentuan ini tidak dapat dijadikan dasar Tergugat untuk menerbitkan Objek Sengketa *aquo* dan memberhentikan Penggugat.
- 4). Penjelasan ketentuan huruf (d) Pada Pasal 53 ayat (2) bahwa Penggugat tidak pernah melanggar larangan sebagai Perangkat Desa. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya surat teguran atau peringatan yang dibuat atau diterbitkan oleh Tergugat pada Penggugat sebelum diterbitkannya Objek Sengketa *aquo*, sehingga ketentuan ini tidak dapat dijadikan dasar Tergugat untuk menerbitkan Objek Sengketa *aquo* dan memberhentikan Penggugat.

b) Pasal 53 ayat (3)

Pasal tersebut menyebutkan bahwa **“Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama Bupati/Walikota“**

Bahwa setahu Penggugat, KTUN atas Objek Sengketa tidak disertai dengan Rekomendasi Tertulis dari Camat Kikim Timur, sehingga dari ketentuan Pemberhentian Penggugat tanpa ada rekomendasi secara tertulis dari Camat Kikim Timur dalam memberhentikan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ayat (3) menjadikan Objek Sengketa *aquo* cacat administrasi sehingga tidak sah dimata hukum.

c) Pasal 52 ayat (1)

Pasal tersebut menyebutkan bahwa **“Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administrative berupa Teguran Lisan dan atau teguran Tertulis”**



Bahwa dari penjelasan Pasal tersebut menjelaskan tentang proses dan mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa yang wajib diikuti dan dilaksanakan oleh Kepala Desa Patikal Lama, karena Penggugat **tidak pernah mendapatkan Surat Teguran** dan tidak pernah menerima Surat Pemberhentian sementara sehingga Objek Sengketa *aquo* yang diterbitkan oleh Tergugat sangatlah bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa.

Berdasarkan uraian-uraian huruf a,b, dan c diatas sangat nyata dan jelas bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *aquo* telah bertentangan dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, dengan penjelasan yang diuraikan diatas semestinya Tergugat dalam memberhentikan Penggugat haruslah berpedoman dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, karena undang-undang tersebut merupakan adalah Dasar dan Perintah serta Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Tergugat dalam pelaksanaan Pemberhentian Perangkat Desa. Dengan demikian Objek Sengketa *aquo* haruslah dibatalkan dan mewajibkan Tergugat mencabut dan merehabilitasi kedudukan Penggugat yang telah diberhentikan untuk kembali diangkat menjadi Perangkat Desa Patikal Lama.

b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Pasal 68 ayat (2)

Pasal tersebut menjelaskan bahwa "Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf c karena"

- a) Usia telah genap 60 Tahun;
- b) Berhalangan tetap
- c) Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa.
- d) Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.



2 Keputusan Tata Usaha Negara Bertentangan Dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Bahwa Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan pula dengan Asas Umum Pemerintahan yang baik dimana di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Administrasi Pemerintahan Pasal 10 ayat 1, AUPB yang telah di langgar oleh Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *aquo* adalah :

a) Asas Kepastian Hukum, bahwa yang dimaksud KTUN bertentangan dengan asas kepastian hukum adalah bahwa dalam bernegara hukum mengutamakan landasan ketentuan dan keadilan dalam setiap penyelenggaraan pemerintah sebab fakta menunjukkan bahwa Tergugat sengaja mengabaikan ketentuan hukum, oleh karenanya tindakan Tergugat bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan yang baik. Menurut doktrin dari JIMLY berpendapat bahwa ***“dalam paham Negara hukum segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dahulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan demikian setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau ‘rules and procedur.’”***

b) Asas Tertib Penyelegaran Negara, bahwa yang dimaksud KTUN bertentangan dengan Asas Tertib Penyelegaran Negara adalah bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa menunjukkan bahwa Tergugat tidak tertib dalam menjalankan tugasnya selaku kepala Negara Desa Patikal Lama Kecamatan Kikim Timur dengan cara sewenang-wenang memberhentikan Perangkat Desa Patikal Lama atau Penggugat tanpa berdasarkan Ketentuan Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. oleh karenanya tindakan Tergugat bertentangan dengan



Asas Umum Pemerintahan yang baik. Menurut doktrin dari SJAHRAN BASAH mengemukakan bahwa **“walaupun administrasi Negara memiliki keleluasaan dalam menentukan kebijakan-kebijakan, tetapi sikap dan tindakannya itu haruslah dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa dan secara hukum harus memperhatikan batas atas dan batas bawah dengan memperhatikan undang-undang 1945 sebagai tolak ukurnya.**

c) **Asas Kecermatan**, bahwa yang dimaksud KTUN bertentangan dengan asas kecermatan adalah dalam penerbitan Objek Sengketa *aquo* Tergugat tidak memperhatikan dan meneliti dengan seksama data yuridis dan fisik yang menjadi dasar Objek Sengketa, dikarenakan Surat Keputusan Pengangkatan dan Pemberhentian yang diketahui oleh Penggugat tidak dituliskan atau disertai dengan pertimbangan-pertimbangan hukum atas dasar penerbitan Objek Sengketa *aquo* oleh karenanya tindakan Tergugat bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan yang baik.

d) **Asas Transparansi**, bahwa dasar pemberhentian Penggugat tidak pernah disampaikan kepada Penggugat dan baru memberikannya kepada Majelis Hakim setelah adanya gugatan *aquo*, bahwa hal ini tentu saja bertentangan dengan asas transparansi Penggugat memiliki hak untuk mengetahui berdasarkan pertimbangan hukum yang mana Penggugat diberhentikan sebagai Perangkat Desa Patikal Lama, sedangkan Tergugat sengaja menyembunyikan KTUN / Objek sengketa *aquo*, oleh karenanya tindakan Tergugat bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan yang baik.

Bahwa berkaitan dengan asas-asas tersebut diatas, telah nyata dan jelas bahwa Tergugat selaku Kepala Desa Patikal Lama dalam menerbitkan atau mengeluarkan Objek Sengketa *aquo* telah bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Semestinya dalam mengeluarkan atau menerbitkan keputusan Objek Sengketa *aquo* atau KTUN yang menjadi Objek Sengketa selalu



mengutamakan landasan, kepatutan, keadilan, dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Tergugat, hal tersebut telah ditekankan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 7 ayat 2 huruf (b) yang menyatakan bahwa **Pejabat Pemerintah memiliki kewajiban “mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”** karena Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan AUPB, Objek Sengketa *aquo* haruslah dibatalkan atau dinyatakan tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabutnya serta merehabilitasi kedudukan Penggugat yang telah diberhentikan untuk dikembalikan atau diangkat menjadi Perangkat Desa Patikal Lama.

G. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil yang Penggugat sampaikan diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah :
Keputusan Kepala Desa Patikal Lama Nomor : 141/12/SK/PTL-KT/2022 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Dan Sekretaris Desa Patikal Lama Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat tertanggal 06 Juli 2022 atas nama JUMHANI.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :
Keputusan Kepala Desa Patikal Lama Nomor : 141/12/SK/PTL-KT/2022 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Dan Sekretaris Desa Patikal Lama Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat tertanggal 06 Juli 2022 atas nama JUMHANI.
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan Penggugat seperti semula sebagai Kadus Dua Desa Patikal Lama, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan berpendapat lain mohon dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*)

Menimbang bahwa, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis atas Gugatan Penggugat pada tanggal 20 Oktober 2022, pada pokoknya :

Sebelum Tergugat menyampaikan Jawaban atas gugatan Penggugat, terlebih dahulu Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil/alasan Penggugat yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;

DALAM EKSEPSI

Bahwa Penggugat keliru dan tidak cermat dalam gugatan, karena objek sengketa *in casu* Keputusan Kepala Desa Patikal Lama Nomor: 141/12/SK/PTL-KT/2022 diterbitkan pada tanggal 6 Juli 2022 tidak berdiri sendiri, tetapi telah didahului Surat Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Patikal Lama dari Camat Kikim Timur, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa Tergugat menyatakan segala yang telah dikemukakan pada bagian DALAM EKSEPSI tersebut di atas juga dimasukkan DALAM POKOK PERKARA, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa pada halaman 5 (lima) huruf E, Dasar Gugatan Penggugat mengatakan: Penggugat telah bekerja selama lebih 3 (tiga) tahun, dan telah mengabdikan dengan baik tidak pernah melakukan pelanggaran dan tidak pernah memiliki masalah, dan bekerja sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, tidak pernah mendapatkan teguran dan tidak pula mendapatkan surat pemberhentian sementara, namun setelah dikeluarkannya OBJEK SENGKETA, kedudukan Penggugat sudah diberhentikan sebagai Perangkat Desa Patikal Lama, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat;
Bahwa dasar gugatan ini adalah tidak benar, karena:

Halaman 16 Putusan Perkara Nomor 253/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- PENGGUGAT melanggar aturan hukum, dengan berpolitik saat pemilihan kepala desa Patikal Lama pada bulan Desember 2022; Apabila dikaitkan dengan Pasal 51 huruf (j) UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Perangkat Desa dilarang “**ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah**”;

Penjelasan Pasal 51 huruf (j): Penggugat berpolitik dengan berkampanye aktif mengajak warga masyarakat memilih salah satu calon kepala desa pada Pilkades Patikal Lama tahun 2021;

- Penggugat diberhentikan karena **berpolitik**;
- Apabila dikaitkan dengan Pasal 53 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, jo. Pasal 5 huruf (e) Permendagri No.67 tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No. 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa:

UU No.6 Tahun 2014:

Pasal 53

(1) Perangkat Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau
- c. **diberhentikan**

Penjelasan Pasal 53 ayat (1) c adalah Penggugat **diberhentikan** karena **berpolitik**;

Pasal 5 huruf (e) Permendagri No. 67 tahun 2017:

Pasal 5

- (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:



- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. berhalangan tetap;
- d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan
- e. **melanggar larangan sebagai perangkat Desa.**

Penjelasan Pasal 5 huruf (e) “melanggar larangan sebagai perangkat Desa”: Penggugat diberhentikan karena berpolitik, yang merupakan melanggar larangan sebagai perangkat Desa;

1. Bahwa dasar gugatan Penggugat yang mengatakan objek sengketa *a quo* tidak disertai rekomendasi tertulis dari Camat Kikim Timur menjadi cacat administrasi sehingga tidak sah dimata hukum;
Bahwa alasan gugatan ini adalah tidak benar, karena pada tanggal 30 Juni 2022, Tergugat telah berkonsultasi ke Camat Kikim Timur dengan mengirimkan surat permohonan rekomendasi pemberhentian perangkat desa Patikal Lama melalui surat Nomor: 140/141PTL-KT/2022;
2. Bahwa pada halaman alasan gugatan Penggugat yang mengatakan mengatakan:
Keputusan yang telah dikeluarkan Tergugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);
Bahwa alasan gugatan ini adalah tidak benar karena dikeluarkannya objek gugatan *a quo* sama sekali tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), sebab apa yang dilakukan oleh Tergugat terkait dengan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Patikal Lama, Kecamatan Kikim Timjur, Kabupaten Lahat secara hukum sudah benar dan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, tindakan Tergugat dengan memberhentikan adalah syarat untuk mengisi kekosongan jabatan perangkat desa pasca pengunduran diri Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, dalil-dalil gugatan Penggugat yang lain karena tidak beralasan secara hukum maka tidak perlu ditanggapi dan harus dikesampingkan; Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat memohon dengan hormat sudilah kiranya Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang mengadili perkara *a quo* berkenan memutuskan sebagai berikut

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaar*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis terhadap jawaban Tergugat pada tanggal 27 Oktober 2022 dan terhadap Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis pada tanggal 3 November 2022;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai P-11, yaitu sebagai berikut :

1. P-1 : Keputusan Kepala Desa Patikal Lama Nomor : 141/12/SK/PTL-KT/2022 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Dan Sekretaris Desa Desa Patikal Lama Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat tanggal 06 Juli 2022 atas nama JUMHANI RS. (Sesuai dengan asli).
2. P-2 : Surat keberatan kepada Kepala Desa Patikal Lama Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat Nomor : 10/WI/IX/2022 tertanggal 06 September 2022 Perihal : Surat Keberatan atas Keputusan Kepala Desa Patikal Lama, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat

Halaman 19 Putusan Perkara Nomor 253/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 141/12/SK/PTL-KT/2022 Tentang Pemberhentian Kaur Tata Usaha dan Umum Desa Patikal Lama, Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat atas nama JUMHANI RS (Sesuai dengan fotokopi).

3. P-3 : Keputusan Kepala Desa Patikal Lama Nomor : 140/07/PTL/SK/2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Patikal Lama Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat atas nama Jumhani RS tanggal 15 Januari 2016. (Sesuai dengan aslinya).
4. P-4 : Absensi (Daftar hadir) Perangkat Desa Desa Patikal Lama dari Januari-Desember 2021 dan bulan Januari-Juni 2022 (Sesuai dengan fotokopi).
5. P-5 : Surat Edaran dari Camat Kikim Timur yang ditujukan kepada Kepala Desa sekecamatan Kikim Timur tanggal 22 Desember 2021 Nomor : 140/204/Kec KT/2021, Perihal Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa. (Sesuai dengan fotokopi).
6. P-6 : Surat Edaran dari Gubernur Sumatera Selatan yang ditujukan kepada Bupati/Walikota se-Sumsel, tanggal 17 September 2021 Nomor : 141/2715/DPMD-I/2021, Hal Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa. (Sesuai dengan fotokopi)..
7. P-7 : Identitas Kartu Tanda Penduduk dari Penggugat atas nama JUMHANI RS (Sesuai dengan Aslinya).
8. P-8 : Surat Kepala Desa Patikal Lama yang ditujukan kepada Bupati Lahat cq. Camat Kikim Timur tanggal 21 Agustus 2022 Nomor : 140/PTL/KT/2022, Hal : Permohonan Pencairan Siltap/Tunjangan Bulan Agustus . (Sesuai dengan asli).
9. P-9 : Foto Perangkat Desa Patikal Lama yang sudah berkerja di Kantor Kepala Desa Patikal Lama, Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat. (Sesuai dengan fotokopi).

Halaman 20 Putusan Perkara Nomor 253/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. P-10 : Foto pertemuan Penggugat dengan Camat Kikim Timur tanggal 11 Juli 2022 di Rumah Dinas Camat Kikim Timur. (Sesuai dengan fotokopi).
11. P-11 : Surat Kepala Desa Patikal Lama Nomor 140/ /PTL/KT/2022 tanggal 15 Juni 2022 kepada bupati Lahat cq Camat Kikim Timur (Sesuai dengan fotokopi);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterei cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.1 sampai dengan T.9, yaitu sebagai berikut :

1. T-1 : Keputusan Bupati Lahat Nomor : 141/138/KEP/PMD/V/2021 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Patikal Lama Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat. Tanggal 17 Desember 2021 beserta Lampirannya. (Sesuai dengan asli).
2. T-2 : Keputusan Kepala Desa Patikal Lama Nomor : 141/12/SK/PTL-KT/2022 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Dan Sekretaris Desa Desa Patikal Lama Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat tanggal 06 Juli 2022 atas nama Jumhani . (Sesuai dengan asli)
3. T-3 : Surat Pernyataan warga Patikal Lama atas nama Edi Sumardianto tanggal 3 Oktober 2022 (Sesuai dengan asli).
4. T-4 : Berita Acara Musyawarah Warga Desa Patikal Lama untuk membentuk Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Patikal Lama tanggal 7 Juli 2022. (Sesuai dengan asli).
5. T-5 : Keputusan Kepala Desa Patikal Lama Nomor : 140/018/KEP/PTL-KT/2022 tentang Pembentukan Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa tahun 2022 tanggal 08 Juli 2022 . (Sesuai dengan asli);
6. T-6 : Pengumuman Pendaftaran Penerimaan Calon Perangkat Desa Patikal Lama dan ditempel ditempat-tempat strategis di Desa Patikal Lama tanggal 8 Juli dan 11 Juli 2022 beserta foto

Halaman 21 Putusan Perkara Nomor 253/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sesuai dengan aslinya);

7. T-7 : Keputusan Kepala Desa Patikal Lama Nomor : 140/43/PTL/K.TIM/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Patikal Lama Kabupaten Lahat tanggal 18 Juli 2022 (Sesuai dengan asli)
8. T-8 : Berita Acara proses penjarangan dan penyaringan perangkat desa Patikal Lama Nomor : 140/04/BA/PTL/KT/2022 tanggal 18 Juli 2022 (sesuai dengan aslinya);
9. T-9 : Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Patikal Lama Kec. Kikim Timur Nomor : 140/137/PTL-KT/2022 tanggal 30 Juni 2022 (sesuai dengan aslinya);

Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. MARDIANSYAH :

- Saksi menerangkan, kenal semua dengan Bapak – bapak yang menjadi panitia yang bernama , Sumanteri, Sapran, Sahlan Rasmawan, Isnan;
- Saksi menerangkan Bapak Sumanteri di desanya sebagai ketua BPD, Bapak Sapran masyarakat biasa berumur 35 Tahun, Bapak Sahlan masyarakat biasa umur lebih dari 60 Tahun, Bapak Rasmawan masyarakat biasa umur 50 Tahun, kesumaanya penduduk Desa Patikal Lama;
- Saksi menerangkan, pada saat ini tidak ada kegiatan penjarangan, saksi mengatakan kenal dengan Bapak Dedek Saputra, Aris Pabila, Rahmat Hidayat, Hidayat Tullah, Abu Hsan, Sapar Abdullah, Septa Anhar, Efriansyah, Wawan, Sisil Optapia, Sapran, Meriani, Neni Diana, Doni Pratama;
- Saksi menerangkan, menjadi Kepala Desa sejak Desember 2015 sampai dengan Desember 2021, perangkat desa saat itu Bariadi dan Rizalkamedi;
- Saksi menerangkan, ada yang diangkat kembali ada juga yang di rumahkan, namanya ada yang ingat ada yang lupa;

Halaman 22 Putusan Perkara Nomor 253/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan, Didi Sumanteri diangkat pada Tahun 2016, jabatannya dialihkan dengan Jumhari sebagai Kaur Pembangunan, berubah lagi menjadi Kasi Kesra, jabatan Didi Sumanteri Kepala Dusun 2;
- Saksi menerangkan, Habib Habibillah menjadi perangkat desa sejak Tahun 2019, dengan jabatan Sekretaris Desa, sebelumnya Samsi Aripin;
- Saksi menerangkan, Mariadi menjadi perangkat desa Tahun 2019, jabatannya Kadus 1, Ujang Sariono jadi perangkat desa Tahun 2019, Jabatannya Kadus 4, Huzairi Jabatannya Kasi pelayanan Tahun 2016;
- Saksi menerangkan, peserta yang nomor urut 1, 2 dan 3 saksi lupa;
- Saksi menerangkan, diperlihatkan bukti T-2 dan T-3 kepada saksi, saksi mengatakan baru lihat dipersidangan hari ini la sebelumnya belum pernah lihat;
- Saksi menerangkan, mengenai kompanye itu ada undang-undangnya tapi saya lupa nomor dan tahunnya;
- Saksi menerangkan, kalau dalam rangka pemilihan Kepala desa maupun perangkat desa tidak ada masa kompanye;
- Saksi menerangkan, kalau masalah kompanye itu kurang memahami, dikategorikan kompanye itu, mungkin saling ajak itu dikatakan kompanye, saya juga tidak tahu ada kompanye saat pemilihan Kepala desa maupun pemilihan perangkat desa, saya masih menjabat Kepala desa bulan sepuluh 2021, saat itu saya mengiginkan keadaan yang kondusif dan berjalan lancar, aman dan tertip;
- Saksi menerangkan, selama dia menjadi kepala desa, tidak ada tegoran terhadap Didi Sumanteri dan bisa bekerja sama dan sesuai dengan ketentuan;
- Saksi menerangkan, kalau dimasa saksi menjabat di undang undang yang baru tahun 2019 disampaikan kepada masyarakat sebagai imbauan;

Halaman 23 Putusan Perkara Nomor 253/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan, perosedur pengangkatan kepala desa semasa saksi menjabat sesuai ketentuan, seperti umur dibawa 42 Tahun, berpendidikan SMA, tempat tinggal harus di desa Patikal Lama, selama saksi menjadi kepala desa sering diadakan pembekalan;
- Saksi menerangkan, pada saat saya menjabat tidak ada penjaringan, karena menurut instruksi dibulan Desember diseluruh desa Kikim Timur tidak ada penjaringan;
- Saksi menerangkan, tahapan-tahapan pemberhentian itu melakukan kesalahan, diberikan surat peringatan, pertama, peringatan ke 1, 2, 3, kalau masaih saja membandel diterbitkan surat pemberhentian, dikonsultasikan dengan Camat untuk pertimbangan, Rekomendasi dari Camat itu penting;
- Saksi menerangkan, kalau menurut undang-undang desa Nomor: 6 Tahun 2014, diberhentikan karena meninggal dunia, umur 50 Tahun keatas, berhalangan tetap, kalau yang tidak masuk keretiria tidak bisa ;
- Saksi menerangkan, semenjak tidak lagi menjadi Kepala Desa saat ada rapat pembentukan panitia tidak diundang dan juga tidak mengetahui, saya tahu ada pengumuman diwarung Cuma satu hari dengan Calon-calon perangkat saya kenal semua, tidak ada yang berumur 21 Tahun semuanya dewasa;
- Saksi menerangkan, Calon kandidat itu ada yang sudah bekerja ada yang belum, yang sudah bekerja ada tida orang, Febriansyah, Hidayatullah, Arwinsah;
- Saksi menerangkan, yang namanya Siltap.(penghasilan tetap) yang sudah mendapatkan SK. kalau yang belum mendapat SK.dan pelantikan belum berhak, baik perangkat desa, BPD., maupun yang laninyya harus ada SK pelantikan;
- Saksi menerangkan, yang dipakai sebagai persyaratan menjadi perangkat desa adalah KTP, sedangkan keterangan Domosili itu sekedar menerangkan hak tempat, kalau KTP. Itu identitas diri dari seseorang;

Halaman 24 Putusan Perkara Nomor 253/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan, tidak tahu mengenai pelayanan perangkat yang diberhentikan dengan yang tidak diberhentikan, mereka itu diberhentikan dahulu baru diangkat kembali;
- Saksi menerangkan, mereka diberhentikan karena tidak sejalan, dan sudah diberikan tegoran 1 dan 2. Orang-orangnya yaitu Edy Yarman, Sinarudin, Jainudin;
- Saksi menerangkan, saat masih menjabat tidak pernah memberikan arahan kesana, itu ada di hak masing-masing dan malahan saya menentang keras pada mereka untuk tidak mengikuti kompanye dalam calon tertentu;
- Saksi menerangkan, karena dari masing-masing perangkat desa saya itu sudah ada pilihan masing-masing, makanya saya berkata ril untuk tidak mengikuti, pergejolan yang ada, saya mengiginkan pemilihan kepala desa yang aman, damai tidak terjadi apa-apa;
- Saksi menerangkan, selaku kepala desa menunjukkan netralisasi kepada mereka tiga Calon, kerumah ketiga calon itu saja saya tidak pernah, saya akan menunjukkan kepada masyarakatmana yang baik mana yang benar;

2. JAINUDIN :

- Saksi menerangkan, tinggal di desa Patikal Lama sejak saya lahir.
- Saksi menerangkan tidak ada keluhan atau komplain dari masyarakat atas pelayanan dari perangkat desa yang sekarang;
- Saksi menerangkan, tahu keaktifan perangkat yang baru karena kantor desa tidak jauh dari rumah saya;
- Saksi menerangkan, tidak dilibatkan dalam panitia pemilihan perangkat yang baru ini, yang menjadi panitia Sapran dengan Isnan. ada ditempel pengumuman hanya satu hari saja;

Halaman 25 Putusan Perkara Nomor 253/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan, sudah ada perangkat yang baru menggantikan para Penggugat, masalah legal tidaknya saya tidak tahu karena saya sebagai masyarakat biasa tidak berkecimpung dalam pemerintahan;
- Saksi menerangkan, kalau berbentuk acara tidak mendengar tapi kalau isu mereka sudah diangkat ada, buktinya mereka sudah bekerja, mengenai pelayanannya bagaimana saya belum mengetahui, mereka mulai bekerja bulan Juni;
- Saksi menerangkan, Perangkat desa Didi Sumanteri setiap jam kerja ada dikantor;
- Saksi menerangkan, semasa kepala desa yang lama sudah ada kantor desa, jarak rumah saya dengan kantor desa lebih kurang lima ratus meter, mereka itu bekerja dari jam 7 pagi sampai dengan jam 3 sore;
- Saksi menerangkan, saat pemilihan kepada desa tahun 2021 saya sebagai calon nomor urut tiga, tidak ada sama sekali para perangkat desa yang memilih saya, tidak ada satu pun perangkat desa yang ditunjuk untuk menjadi tim sukses saya;
- Saksi menerangkan, tidak tahu persis kapan perangkat desa ini diberhentikan;

Tergugat juga telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. SUMARLIN :

- Saksi menerangkan, jabatannya di sesa sebagai Ketua BPD, dari Tahun 2019, berakhir Tahun 2025, anggota BPD. berjumlah liam orang;
- Saksi menerangkan, dari tahun 2019 sampai sekarang desa Patikal Lama ada terjadi pemilihan kepala desa, di Tahun 2021;
- Saksi menerangkan, saat itu kandidat sebagai calon Kepala Desa ada tiga orang, bernama Widi Arman, Sinarudin, Jainudin, yang mendapat suara

Halaman 26 Putusan Perkara Nomor 253/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertinggi nomor urut 1 dan nomor urut 2 digabungkan dengan sinarudin hampir sama lima puluh persen, namun perolehan sinarudin lupa ;

- Saksi menerangkan, mengetahui saat Kepala Desa mengusulkan pemberhentian berkomunikasi atau lewat surat ke Kantor Camat;
- Saksi menerangkan, saat Sinarudin terpilih sebagai kepala desa masih perangkat desa yang lama, perangkat desa yang lama diberhentikan sejak enam bulan menjabat kepala desa yang baru;
- Saksi menerangkan, dia mengetahui pada tanggal 30 Juni 2022, bahwa Kepala desa cerita saat rapat dia ada mengusulkan pemberhentian, dan juga lewat surat kepada Camat, tapi tidak pernah melihat surat tersebut ;
- Saksi menerangkan, yang mengadakan rapat kepala desa, mengundang BPD, menceritakan tentang Rekomendasi pemberhentian perangkat desa yang lama ke kantor Camat;
- Saksi menerangkan, yang hadir saat rapat ketua BPD, pembuka masyarakat, seperti LKMD. BKM;
- Saksi menerangkan, yang mewakili LKMD. Lupa orangnya, kalau yang mewakili BKM Sapran dan Rasmawan dari Dusun 2;
- Saksi menerangkan, Kepala Desa selalu melaporkan semua kegiatan kepada BPD.
- Saksi menerangkan, bahwa didi Sumanteri itu selalu banyak kesibukan di pekerjaan yang lain tidak disiplin, dibahas dalam rapat;
- Saksi menerangkan, rapat tanggal 28 Juni sedangkan Rekomendasinya tanggal 30 Juni, Rekomendasi itu saksi tahu dari Camat, dalam rapat itu tidak membahas masalah yang lain hanya membahas rekomendasi pemberhentian;

Halaman 27 Putusan Perkara Nomor 253/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan, dia diundang rapat untuk pemberhentian bahwa kepada yang bersangkutan memberikan rekomendasi pemberhentian perangkat yang lama setelah itu bubar;
- Saksi menerangkan, tidak tahu apakah rekomendasi pemberhentian dari Camat itu sudah ada tanggapan apa belum, surat menyurat KE BPD. diberikan kepada saya sebagai ketua BPD;
- Saksi menerangkan, setelah perangkat yang lama diberhentikan yang membantu kepala desa perangkat yang lama yang tidak diberhentikan, yang tidak diberhentikan hanya dua orang bernama Erwin dan Eko;
- Saksi menerangkan, mereka bekerja dari jam 8 pagi sampai dengan jam 12 siang, sedangkan jam kerjanya dari jam 8 sampai dengan jam 4 sore dari hari Senin sampai dengan hari Jumat;
- Saksi menerangkan, yang bekerja sampai dengan jam 4 tidak tahu, kalau kepala desa bekerjanya dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore sesuai yang telah disampaikan kepala desa;
- Saksi menerangkan, menurut laporan dari kepala desa kepada saksi sudah diberikan teguran, kepala desa dengan BPD. sering mengadakan rapat koordinasi;
- Saksi menerangkan, kepala desa sudah memberikan teguran berulang-ulang kali kepada perangkat desa;
- Saksi menerangkan, para Penggugat masih bekerja dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni selama enam bulan;
- Saksi menerangkan, alasan para Penggugat diberhentikan karena tidak sejalan dalam arti tidak disiplin dan bekerja tidak maksimal, banyak bekerja di dua tempat;
- Saksi menerangkan, selain yang tidak maksimal saksi tidak atahu apakah Para Penggugat ada yang tidak menjalankan tugas;

Halaman 28 Putusan Perkara Nomor 253/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan, kalau BPD. itu tidak ada kantor kantornya di rumah jam kerjanya sama dengan perangkat desa, Kalau Didi Sumanteri itu kerjanya sama dengan yang lain;
- Saksi menerangkan, Rekomendasi itu pemberitahuan pemberhentian dengan Camat dari Kepala desa, kalau yang dari Camat saya tidak tahu;
- Saksi menerangkan, persyaratan menjadi perangkat desa itu apakah cukup dengan surat keterangan Domosili atau KTP. Saya tidak tahu;
- Saksi menerangkan, tidak tahu apakah perangkat desa mendapat teguran beberapa kali, saksi sebagai ketua BPD. tidak pernah menerima tegoran pertama, sebagai ketua BPD. pernah menyampaikan tegoran secara lisan;
- Saksi menerangkan, tugas-tugas dari BPD. itu menampung aspirasi masyarakat apa yang disampaikan masyarakat disampaikan pada pemerintah desa, dikoordinasikan dengan Camat;
- Saksi menerangkan, jumlah anggota BPD. itu terdiri dari lima orang;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan tertulis pada tanggal 15 Desember 2022 ;

Menimbang bahwa Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang Bahwa Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam gugatan Penggugat memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa : Keputusan Kepala Desa Patikal Lama Nomor : 141/12/SK/PTL-KT/2022 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Dan Sekretaris Desa Patikal Lama Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat tertanggal 06 Juli 2022 atas nama Jumhani (*vide* bukti P-1 = bukti T.2), selanjutnya disebut Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada

Halaman 29 Putusan Perkara Nomor 253/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan tindakan Tergugat melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelengaran Negara, Asas Kecermatan dan Asas Transparansi;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya memuat tentang eksepsi dan terhadap pokok perkara telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat serta menyatakan penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi telah diatur dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.
2. Eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.
3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Obscuur Libel yang dihubungkan dengan Pasal 77 tersebut di atas, diketahui merupakan eksepsi lain-lain yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Tidak Jelas /*Obscuur Libel*

Halaman 30 Putusan Perkara Nomor 253/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang Gugatan Penggugat Tidak Jelas / *Obscuur Libel* dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut : “Bahwa Penggugat keliru dan tidak cermat dalam gugatan, karena objek sengketa *in casu* Keputusan Kepala Desa Patikal Lama Nomor: 141/12/SK/PTL-KT/2022 diterbitkan pada tanggal 6 Juli 2022 tidak berdiri sendiri, tetapi telah didahului Surat Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Patikal Lama dari Camat Kikim Timur, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya mengatur tentang :

1. Gugatan harus memuat :
 - a) Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya ;
 - b) Nama jabatan, tempat kedudukan Tergugat ;
 - c) Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan ;
2. Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang Kuasa Penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah ;
3. Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyempurnakan dan melengkapi gugatan yang kurang jelas pada acara pemeriksaan persiapan yang terakhir dilakukan pada tanggal 6 Oktober 2022 sebagaimana dimaksud Pasal 63 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menguraikan secara jelas mengenai aspek formal gugatan, berupa: kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, objek gugatan, tenggang waktu pengajuan gugatan dan kepentingan penggugat yang dirugikan sebagaimana dimaksud Pasal 47, Pasal 50, Pasal 54 ayat (1), dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Jo.* Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5

Halaman 31 Putusan Perkara Nomor 253/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Jo.* Pasal 1 angka (9) dan angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa dalam dasar dan alasan gugatan, Penggugat telah menguraikan duduk sengketa dan telah pula menyebutkan alasan- alasan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, gugatan Penggugat telah membuat subjek dan objeknya secara jelas demikian pula ada keterkaitan antara *fundamentum petendi* dengan *petitumnya* sehingga secara formal gugatan sudah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan sudah cukup jelas oleh karena itu eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Tidak Jelas /*Obscuur Libel* tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa meskipun tidak menjadi eksepsi, namun sebelum mempertimbangkan Pokok Perkara, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai syarat formal pengajuan gugatan dalam hal kewenangan mengadili atau kompetensi absolut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan kewenangan mengadili dan kompetensi absolut, Pengadilan merujuk pada ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya

Halaman 32 Putusan Perkara Nomor 253/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara termuat dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya konstruksi ketentuan mengenai pengertian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas, diperluas dengan ketentuan Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8, dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang pada pokoknya mengatur tentang di mana suatu Keputusan dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara atau disebut juga dengan Keputusan Administrasi Pemerintahan apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
- d. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau;
- e. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan mencermati beberapa ketentuan hukum seperti diuraikan di atas yang dihubungkan dengan Gugatan *a quo*, Pengadilan berpendapat bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tuntutan dari Penggugat untuk menyatakan batal atau tidak sahnya objek sengketa, yang setelah Pengadilan cermati objek sengketa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan, karena merupakan penetapan tertulis berupa Keputusan yang

Halaman 33 Putusan Perkara Nomor 253/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Kepala Desa Patikal Lama, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa Pemberhentian serta Pengangkatan Perangkat Desa Patikal Lama, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat, yang bersifat konkrit, individual untuk dan atas nama Pengugat, serta bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan, baik dari instansi atasan maupun instansi lain, dan menurut Penggugat dalam dalil Gugatannya telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat, kemudian yang menjadi dasar Gugatan, alat uji serta penilaian Pengadilan adalah ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam hal kewenangan, prosedur serta substansi penerbitan objek sengketa, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa sengketa ini termasuk dalam sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan gugatan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan tenggang waktu mengajukan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan berpedoman pada Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan selanjutnya sejak diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi khususnya pada Pasal 5, diatur pada pokoknya bahwa penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari adalah setelah diajukannya upaya administratif;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 75 sampai dengan 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur pada pokoknya sebagai berikut:

Pasal 75 (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan

Halaman 34 Putusan Perkara Nomor 253/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. keberatan; dan;
- b. banding;

Pasal 76 (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;

- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;
- (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif;

Pasal 77 (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 24 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana

Halaman 35 Putusan Perkara Nomor 253/G/2022/PTUN.PLG



dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;

- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Pasal 78 (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;

- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Menimbang, bahwa sesuai maksud dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif pada pokoknya menentukan bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutur dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif menggunakan peraturan dasarnya, namun dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan tidak menemukan ketentuan khusus mengenai prosedur upaya administratif pada aturan-aturan yang mendasari penerbitan objek sengketa, maka peraturan yang digunakan dalam menempuh upaya administratif adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan gugatan, jawab-menjawab, pemeriksaan di persidangan dihubungkan dengan bukti-bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak, Pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat adalah Perangkat Desa di Desa Patikal Lama Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Patikal Lama Nomor: 141/03/PL/SK/KT/2019 Tentang Alih Tugas Jabatan Perangkat Desa, Desa Patikal Lama Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat, tertanggal 8 Januari 2019 dengan Jabatan Kadus II (*vide* bukti P-12);
- b. Bahwa objek sengketa *aquo* terbit pada tanggal 6 Juli 2022 (*vide* bukti P-1 = bukti T.2);
- c. Bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administrasi berupa keberatan atas terbitnya objek gugatan *a quo* kepada Tergugat melalui surat tertanggal 6 September 2022 (*vide* bukti P-2);
- d. Bahwa Gugatan didaftarkan di PTUN Palembang tanggal 21 September 2022;

Menimbang, bahwa objek sengketa *aquo* diterbitkan Tergugat pada tanggal 6 Juli 2022 dan Penggugat mengetahui objek sengketa *aquo* pada hari itu juga, selanjutnya Penggugat mengajukan keberatan melalui surat tertanggal 6 September 2022 dan berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka tenggang waktu dihitung dari sejak 10 (sepuluh) hari kerja tidak dijawabnya keberatan oleh Tergugat sampai didaftarkanya gugatan Penggugat pada

Halaman 37 Putusan Perkara Nomor 253/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 September 2022 di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, sehingga berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan yang diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa Tergugat berkedudukan di Desa Patikal Lama, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan maka berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang untuk memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa *aquo*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Tidak Jelas *Obscur Libel* sudah seharusnya dinyatakan tidak diterima dan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan akan menguji penerbitan objek sengketa dari sisi hukum administrasi, yaitu apakah penerbitan objek sengketa dalam aspek kewenangan, prosedur serta substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Aspek Kewenangan;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah keputusan tentang pemberhentian perangkat desa pada Desa Patikal Lama;

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur kewenangan untuk memberhentikan perangkat desa terdapat dalam beberapa peraturan

Halaman 38 Putusan Perkara Nomor 253/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan sebagai berikut:

Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada pokoknya menyatakan Kepala Desa berwenang : *b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa ;*

Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada pokoknya menyatakan : *"Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota"* ;

Pasal 5 Ayat (1) dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagai berikut :

(1) Kepala Desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat;

(2) -

(3) -

(4) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk mengangkat perangkat desa diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada pokoknya menyatakan *"Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota"*

Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagai berikut: yang pada pokoknya berbunyi bahwa Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum seperti disebutkan di atas

Halaman 39 Putusan Perkara Nomor 253/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan objek sengketa *a quo*, Pengadilan berpendapat bahwa kewenangan untuk memberhentikan dan mengangkat Perangkat Desa di Desa Patikal Lama adalah menjadi kewenangan Kepala Desa Patikal Lama; Menimbang, bahwa lebih lanjut Pengadilan akan menilai keabsahan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan suatu Keputusan dari secara materi (*ratione materiae*), waktu (*ratione temporis*) dan tempat (*ratione loci*), sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kemudian dikaitkan objek sengketa yang terbit pada tanggal 6 Juli 2022 ditandatangani oleh Kepala Desa Patikal Lama atas nama Sinarudin (*vide* bukti P-1 = bukti T.2);

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Lahat Nomor : 141/138/KEP/PMD/V/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Patikal Lama Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat tanggal 17 Desember 2021 (*vide* bukti T.1) diketahui bahwa Bupati Lahat telah memutuskan mengangkat Kepala Desa Definitif atas nama Sinarudin, maka Pengadilan berpendapat Sinarudin selaku Kepala Desa Patikal Lama yang menandatangani objek sengketa, baik secara materi, waktu, maupun tempat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Pengadilan berkeyakinan Kepala Desa Patikal Lama *ic.* Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa, dengan demikian penerbitan objek sengketa oleh Tergugat dari aspek Kewenangan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Aspek Prosedur dan Substansi

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak, sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa pada pokoknya telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 52 ayat (1), Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor

Halaman 40 Putusan Perkara Nomor 253/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 68 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa. (*vide* dalil Penguat dalam gugatan);

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat yang tertuang dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan AAUPB;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil antara pihak tersebut, Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang memuat ketentuan bahwa untuk menemukan kebenaran materiil dalam proses pemeriksaan perkara di Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim bersifat *dominus litis* atau bersifat aktif, sehingga dalam mengemukakan pertimbangan hukum tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa peraturan yang mengatur tentang Pemberhentian Perangkat Desa sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa:

Pasal 53 Perangkat Desa berhenti karena;

(1) Perangkat Desa berhenti karena :

- a. Meninggal dunia ;
- b. Permintaan sendiri ; dan
- c. Diberhentikan ;

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c karena :

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Berhalangan tetap;
- c. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, atau
- d. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa;

(3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala desa setelah dikonsultasikan

Halaman 41 Putusan Perkara Nomor 253/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Camat atas nama Bupati/Walikota;

2. Kemudian lebih lanjut diatur dalam Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

Pasal 68

(1) Perangkat Desa berhenti karena :

- a. Meninggal dunia ;
- b. Permintaan sendiri ; dan
- c. Diberhentikan ;

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Berhalangan tetap;
- c. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, atau
- d. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa;

Pasal 69

Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat desa;
- b. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan
- c. Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan Keputusan kepala Desa;

3. Selanjutnya diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa:

Pasal 5

Halaman 42 Putusan Perkara Nomor 253/G/2022/PTUN.PLG



- (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan
 - e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
- (4) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (5) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain.
- (6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum mengenai pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah terurai di atas, Pengadilan berpendapat baik Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *juncto* Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *juncto* Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa pada intinya adalah secara prosedur dan substansi menghendaki adanya alasan pemberhentian dan Kepala Desa sebelum mengeluarkan surat keputusan mengenai pemberhentian perangkatnya supaya berkonsultasi dan mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari Camat kemudian atas dasar rekomendasi Camat tersebut baru diterbitkan keputusan mengenai pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya bahwa setahu Penggugat, KTUN atas Objek Sengketa tidak disertai dengan Rekomendasi Tertulis dari Camat Kikim Timur, sehingga dari ketentuan Pemberhentian Penggugat tanpa ada rekomendasi secara tertulis dari Camat Kikim Timur dalam memberhentikan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ayat (3) menjadikan Objek Sengketa *aquo* cacat administrasi sehingga tidak sah dimata hukum (*vide* Gugatan Penggugat);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan pada pokoknya bahwa alasan gugatan ini adalah tidak benar, karena pada tanggal 30 Juni 2022, Tergugat telah berkonsultasi ke Camat Kikim Timur dengan mengirimkan surat permohonan rekomendasi pemberhentian perangkat desa Patikal Lama melalui surat Nomor: 140/141PTL-KT/2022 (*vide* Jawaban Tergugat)

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan gugatan, jawab-menjawab, pemeriksaan di persidangan dihubungkan dengan bukti-bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak, Pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Penggugat adalah Perangkat Desa di Desa Patikal Lama Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Patikal Lama Nomor: 141/03/PL/SK/KT/2019 Tentang Alih Tugas Jabatan Perangkat Desa, Desa Patikal Lama Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat, tertanggal 8 Januari 2019 dengan Jabatan Kadus II (*vide* bukti P-12);
- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2022, Tergugat (*in casu* Kepala Desa Patikal Lama) menerbitkan surat Permohonan Rekomendasi Pemberhentian

Halaman 44 Putusan Perkara Nomor 253/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa Patikal Lama, Kec. Kikim Timur yang ditujukan kepada Bapak Camat Kikim Timur melalui Surat Nomor : 140/137/PTL-KT/2022 (*vide* bukti T.9);

- Bahwa pada tanggal 6 Juli 2022, Tergugat *ic.* Kepala Desa Patikal Lama menerbitkan objek sengketa *aquo* (*vide* bukti P-1 = bukti T.2);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas diketahui bahwa Tergugat pada tanggal 30 Juni 2022 Tergugat menyurati Camat Kikim timur melalui Surat Nomor : 140/137/PTL-KT/2022 perihal Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Patikal Lama, Kec. Kikim Timur dan selama pemeriksaan perkara *a quo* berlangsung, Pengadilan menemukan adanya pencantuman alasan pada objek sengketa *aquo* pada konsideran mengingat nomor 1 yang pada pokoknya yaitu adanya evaluasi kerja atas nama Jumahani Jabatan Kadus II tidak sejalan dengan Kepala Desa Patikal Lama Kecamatan Kikim Timur, namun Pengadilan tidak menemukan fakta tentang telah adanya rekomendasi tertulis dari Camat Kikim Timur untuk pemberhentian Penggugat (*vide* bukti P-1 = bukti T.2 *jo.* bukti T.9);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya rekomendasi dari Camat Kikim Timur terlebih dahulu sebelum Tergugat mengeluarkan keputusan mengenai pemberhentian Penggugat, sementara hal tersebut merupakan tahapan dalam prosedur pemberhentian Perangkat Desa, maka Pengadilan berpendapat penerbitan objek sengketa *a quo* secara prosedur telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *juncto* Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *juncto* Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa dari aspek prosedur dan substansi telah dinyatakan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka selanjutnya terhadap dalil yang menyatakan surat keputusan objek sengketa bertentangan dengan asas-

Halaman 45 Putusan Perkara Nomor 253/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas umum pemerintahan yang baik tidak diberi pertimbangan hukum lebih lanjut dan terhadap permohonan Penggugat kepada Pengadilan untuk menyatakan batal objek sengketa patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa telah dinyatakan batal karena cacat prosedur dan substansi, maka kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat juga meminta agar Pengadilan mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan Penggugat seperti semula sebagai Kadus II, Desa Patikal Lama, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tuntutan tambahan sebagaimana yang diminta oleh Penggugat telah termuat juga dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang pada pokoknya menentukan dapat meminta direhabilitasi kedudukannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa penerbitan objek sengketa diterbitkan dengan cacat prosedur dan substansi, dan pada akhirnya dinyatakan batal oleh pengadilan dan diwajibkan pula agar Tergugat mencabut objek sengketa, maka berdasar hukum pula apabila kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan Penggugat seperti semula sebagai Kadus II, dengan demikian Pengadilan mengabulkan amar putusan yang diminta oleh Penggugat dalam sengketa *in casu*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut dimana objek sengketa terbukti cacat prosedur dan substansi sehingga dinyatakan batal oleh Pengadilan, dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa tersebut serta mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan Penggugat seperti semula sebagai Kadus II, maka terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 110 *jo.* Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

Halaman 46 Putusan Perkara Nomor 253/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat selaku pihak yang kalah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti dalam sengketa ini, namun hanya alat bukti yang relevan yang dijadikan bahan pertimbangan, sedangkan alat bukti yang tidak relevan dikesampingkan namun tetap termuat dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Patikal Lama Nomor : 141/12/SK/PTL-KT/2022 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Dan Sekretaris Desa Patikal Lama Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat tertanggal 06 Juli 2022 atas nama Jumhani;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Patikal Lama Nomor : 141/12/SK/PTL-KT/2022 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Dan Sekretaris Desa Patikal Lama Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat tertanggal 06 Juli 2022 atas

Halaman 47 Putusan Perkara Nomor 253/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Jumhani;

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan Penggugat seperti semula sebagai Kadus Dua Desa Patikal Lama, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 264.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022, oleh kami Edi Septa Surhaza, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. Muhammad Afif, S.H., M.H. dan Ulia Alba, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh Rina Zaleha, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dan dikirimkan secara elektronik kepada Para Pihak melalui sistem informasi Pengadilan.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T.T.D.

T.T.D.

Dr. Muhammad Afif, S.H., M.H.

Edi Septa Surhaza, S.H., M.H.

T.T.D.

Ulia Alba, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

T.T.D.

Rina Zaleha, S.H.

Halaman 48 Putusan Perkara Nomor 253/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. PNPB Pendaftaran Surat Kuasa	:	Rp	10.000,-
3. Biaya ATK	:	Rp	150.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp	54.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
6. Materai	:	Rp	10.000,-
JUMLAH	:	Rp.	264.000,-

(Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah)

Halaman 49 Putusan Perkara Nomor 253/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)